

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

1. Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ini disesuaikan dengan masing-masing objek yang ditemukan di lapangan, antara lain sumber daya adalah peran utama pelaksana, antara lain tenaga kerja sebagai pelaksana, dana sebagai penunjang, dan dana sebagai pelaksana. pelaksana agen. Ketiga hal tersebut memiliki kesinambungan yang kuat, tanpa salah satu dari ketiga hal tersebut maka pencegahan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis tidak dapat dilakukan.
2. Ciri-ciri pelaksana dan sikap pelaksana bakti sosial di instansi pelaksana Pelaksanaan kebijakan ini disesuaikan dengan pengamatan atau objek yang ditemukan di tempat, termasuk organisasi anggota pelaksana masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi
3. Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan kebijakan ini disesuaikan dengan obyek yang ditemukan di tempat. Sehubungan komunikasi antara dinas sosial dengan pihak terkait lainnya cukup baik. Instansi terkait terdiri dari unsur Mapolres, Unsur dukcapil, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
4. Dari segi lingkungan dan masyarakat, pelaksanaan kebijakan ini disesuaikan dengan setiap objek yang ditemukan di lokasi, dan masyarakat sendiri tidak berperan aktif dalam membantu pemerintah melaksanakan kebijakan ini. karena masih banyak masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dengan berbagai alasan.

5. Terjadinya hambatan lingkungan eksternal dalam kebijakan ini disesuaikan dengan setiap objek yang ditemukan di tapak. Masyarakat sendiri tidak berperan aktif dalam membantu pemerintah melaksanakan kebijakan ini, karena masih banyak masyarakat yang mendonasikan uang dengan berbagai alasan. Anak jalanan, gelandangan, pengemis dan artis jalanan. Hal ini membuat tujuan kebijakan tidak optimal dalam pelaksanaannya.

5.2. Saran

1. Dari segi sumber daya, perlu ditambahkan faktor pelaksanaan tambahan dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota Mataram.
2. Dilihat dari sifat dan watak pelaksana, sikap pelaksana harus lebih berperan dalam masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
3. Mabes Polri, Dukcapil dan LSM setempat, beserta komponennya, semakin kooperatif dalam kegiatan penertiban.
4. Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penanganan masalah anak tunawisma dan pengemis di Mataram, dengan fokus pada aspek lingkungan dan sosial.
5. Meningkatnya kesadaran publik akan tujuan kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Asna Aneta / *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 Thn. 2010
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik.Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*.Yogyakarta : Gava Media
- A.G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*. Tahun 2005. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi,Aspiani, “*Impelementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor12 tahun 2003 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*”, “*Jurnal Internasional Solusi , ISSN 0216-9835: ISSN 2597-680X, 2020*” (Di unduh melalui <https://scholar.google.com/scholar>)
- Depdiknas .2003. *Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang sistem pendidikan nasional*.
- Edwards III, George C.1980. *Implementing Public Policy*.Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Engkus, “*Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bandung*”, “*Jurnal Internasional,Solusi,ISSN 1978-3787. ISSN 2615-3505*”, 2017.
”Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Makassar” (Di unduh melalui(<http://wdy-z.blogspot.co.id/2013/09/gelandangan-pengemis-anak-jalanan-di.html>))
- Kasmad, Rulinawaty. 2013. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar Kedai Aksara
- “KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” [Online] Available at:
(Di unduh Melalui <http://kbbi.web.id/di>)

“Meningkatnya Jumlah Anak Gelandangan” (Di Unduh melalui <http://www.mediapedulisosial.ga/2016/07/meningkatnya-jumlah-anak-gelandangan.htm>.)

Mazmanian, D.A and Sabatier, P.A, *Implementation and public policy*. Scoot, Foresman and Company, London, 1983

Peraturan Walikota Mataram No.3 tahun 2014 tentang *Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah No.5 tahun 2014 tentang Penanggulangan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram*

Peraturan Walikota Mataram No.36 tahun 2016 tentang *TUPOKSI DINAS SOSIAL*

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 3 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang Sstem Pendidikan Nasional

Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. *The Policy Implementation Process : “A Conceptual framework, Administrasi*, 1975

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1 . Wawancara bersama Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial



Sumber : Dokumentasi Peneliti,2021

Gambar 2 : Wawancara bersama Seksi bidang Rehabilitasi Dinas Sosial



Sumber : Dokumentasi Peneliti,2021

Gambar 3 : Gelandangan di Persimpangan Lampu merah



Sumber: Dokumentasi Peneliti,2021

Gambar 4: Anak Jalanan di Persimpangan Sriwijaya



Sumber : Dokumentasi Peneliti,2021

Gambar 5, 6, dan 7 : Satuan Petugas Dinas Sosial Kota Mataram sedang turun lapangan untuk melaukan razia



Sumber : Dokumentasi Peneliti,2021

